

Ironis, Korupsi Justru Meningkat

Rabu , 12 Desember 2018 | 08:36

http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/5199/ironis_korupsi_justru_meningkat



Sumber Foto Istimewa Ilustrasi

Berapapun tinggi tingkat stadiumnya, sebuah penelitian menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia dipersepsi public makin meningkat. Ini sangat menyedihkan karena keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab semakin jauh dari kenyataan.

Survei terbaru yang dilakukan bersama oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan mayoritas responden menganggap tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. "Sebanyak 52 persen responden menilai tingkat korupsi meningkat pada tahun ini," kata peneliti LSI, Burhanuddin Muhtadi, di Jakarta, Senin (10/12).

Survei tersebut juga menghasilkan pandangan public bahwa potensi terbesar pungutan liar alias pungli dalam pelayanan birokrasi ada di kepolisian. Peringkat kedua adalah lembaga peradilan, kemudian diikuti lembaga pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan juga kantor layanan pengurusan administrasi seperti KTP, KK, serta Akta Kelahiran.

Kita memandang hasil survei LSI-ICW tersebut hanya mengkonfirmasi pandangan public selama ini bahwa pemberantasan korupsi memang masih jauh dari harapan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus melakukan penangkapan para tersangka, seolah bekerja sendirian karena lembaga-lembaga penegak hukum lainnya tidak bekerja dalam ritme serupa. Ironisnya, banyak penegak hukum justru tertangkap tangan menerima suap.

Ratusan pejabat pusat dan daerah, para politisi, anggota DPR/DPRD, para hakim, panitera, jaksa, polisi, pengusaha serta berbagai kalangan lain terjerat korupsi dan sogok menyogok terkait kelancaran perijinan dan berbagai motif lainnya. Sejak Januari hingga November 2018 KPK telah menggelar 27 operasi tangkap tangan (OTT) dengan jumlah tersangka sangat banyak.

Kasus terakhir KPK menangkap dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo dan Irwan. Ini menunjukkan bahwa kondisi sudah sangat parah karena sebelumnya puluhan hakim telah dijebloskan ke penjara. Hukuman penjara dan penyitaan asset belum menimbulkan efek jera bagi para pejabat, hakim, politisi untuk menggerogoti uang negara, sehingga kasus demi kasus terus berulang.

Lebih menyakitkan lagi, kita sering dipertontonkan betapa para koruptor tetap bisa senyum dan tertawa-tawa di depan kamera televisi, seolah tidak ada penyesalan sama sekali. Apalagi, dengan cara menyogok mereka juga bisa bebas keluar masuk penjara untuk mengurus bisnis, bahkan berkencan dengan pacar di hotel. Sepertinya bagi mereka kehidupan berjalan sebagaimana biasa.

Kondisi ini sangat menyedihkan. Pantas saja peringkat kita dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan Transparency International masih sangat rendah, yaitu posisi 96 dari 180 negara. Kita masih kalah jauh dari negara-negara tetangga di Asean.

Maka perlu dipikirkan beberapa langkah hukum yang lebih keras dan tegas agar pemberantasan korupsi lebih efektif dan efek jeranya lebih terasa.

Pertama, sanksi hukuman bagi koruptor diperberat, termasuk pemiskinan dan pencabutan hak politik.

Kedua, pembekuan dan pembubaran partai politik yang terbukti menampung dana hasil korupsi.

Ketiga, membekukan proyek-proyek pemerintah dan swasta yang dibangun atas perijinan dan prosedur yang menyimpang.

Hal tersebut harus bisa ditampung dalam revisi UU Pemberantasan Korupsi. Namun atas pertimbangan waktu dan kemungkinan tidak memperoleh dukungan para anggota DPR, sebenarnya Presiden bisa menempuh cara yang sah, yaitu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu). Bila memang Presiden memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi maka sangat mungkin baginya melakukan langkah terobosan hukum tersebut.

Perppu tersebut akan menjadi landasan bagi KPK dan para hakim Pengadilan Tipikor untuk menjatuhkan sanksi lebih keras dan tegas terhadap pejabat, politisi, pengusaha dan siapapun yang terjerat korupsi. Alasan penerbitan Perppu tersebut sudah mendesak, mengingat praktek korupsi sudah makin merajalela dan memasuki stadium tinggi. Tidak ada alasan Presiden ragu mengeluarkan Perppu Anti Korupsi, bila ingin dikenang sebagai pemancang tonggak penting dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Sumber Berita:Berbagai sumber